

## BAB 2

### PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, EKOWISATA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MANFAATNYA

Dalam bab ini, diuraikan beberapa konsep yang menunjang penelitian dan menguraikan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.

Dalam penulisan ini, konsep yang akan diuraikan antara lain adalah konsep Pembangunan Berkelanjutan, Ekowisata, Pemberdayaan Masyarakat. Kerangka pemikiran mengenai ekowisata dimaksudkan untuk memberikan informasi dan wawasan secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep ekowisata yang membedakannya dengan pariwisata massa, yang terdiri dari pengertian dan batasan ekowisata, prinsip ekowisata, dan kriteria pengembangan ekowisata. Selanjutnya dipaparkan pula konsep mengenai wisata bahari, dimana *snorkeling* dan menyelam merupakan jenis wisata utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, kerangka pemikiran mengenai pemberdayaan masyarakat dan dampak sosial digunakan sebagai alat untuk menganalisa hasil penelitian ini.

#### 2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Makin berkembangnya kesadaran banyak pihak akan pentingnya kelestarian lingkungan tempat mereka beraktivitas telah mendorong timbulnya konsep pemikiran terhadap lingkungan yang lestari. Konsep tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *sustainable development*. Adapun definisinya menurut *Brundtland Commission* 1987 (Beder, 1993, h.3) adalah sebagai berikut: “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*”

(Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.)

Menurut Brundland kebutuhan yang dimaksud yaitu “kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi” (Supardi, 1994, h. 205). Sedangkan pemerintah persemakmuran Australia

menghindari penggunaan kata kebutuhan dan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: *”Ecologically sustainable development means using, conserving, and enhancing the community’s resources so that ecological processes, on which life depends, are maintained and the total quality of life, now and in the future can be increased.* (Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti menggunakan, memelihara, meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada di masyarakat sehingga proses ekologis dimana kehidupan bergantung dapat dipelihara dan kualitas hidup baik di masa sekarang maupun mendatang dapat ditingkatkan).

Selanjutnya menurut Ponayotou (1994, h.23): *“Sustainable development is an expression of the deal recognition that development is essential and that from all possible forms that development could take only the sustainable variety is desirable”*

(Pembangunan berkelanjutan adalah suatu ekspresi kesepakatan dan pengakuan bahwa pembangunan itu penting dan dari sebagai bentuk-bentuk yang memungkinkan, hanya keberlanjutanlah yang diharapkan.)

Menurut Beder (1993, h.4) di tahun 1960 dan 1970-an, sejumlah orang menyatakan “bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung menyebabkan terjadinya kemunduran pada lingkungan dan tidak dapat berlanjut. Kemudian di tahun 1980-an setelah gerakan awal tersebut, gerakan lingkungan berkembang ke arah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)”. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada manusia, artinya pembangunan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mempertemukan kebutuhan manusia dan menjamin kualitas hidup manusia.

Selain itu menurut Brundland (Soemarwoto, 2001, h.162) definisi pembangunan berkelanjutan memiliki wawasan jangka panjang antar generasi”. Maksud dari kalimat ini menurut Soemarwoto yaitu :

“Bahwa syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut maka pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya membangun dari fisiknya saja yaitu dengan tidak terjadinya kerusakan pada ekosistem tempat hidup manusia, melainkan juga harus adanya pemerataan hasil dan biaya pembangunan yang adil antar negara dan antar kelompok di dalam sebuah

**Universitas Indonesia**

negara. Ini berarti bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang sekarang ada antara negara maju dan negara yang sedang berkembang serta kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di masing-masing negara harus dikurangi. Pemerataan tidak hanya terjadi didalam satu generasi melainkan juga antar generasi”.

Definisi di atas, merupakan definisi yang umum digunakan dan dikutip untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman akan aspek lingkungan penting untuk diperkenalkan pada masyarakat. Agen perubah bisa menjalankan peran sebagai pendidik (*educator*) untuk mengubah pemahaman masyarakat akan pentingnya unsur lingkungan dalam pembangunan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan awal mula munculnya isu lingkungan di beberapa negara yaitu berawal dari adanya gerakan lingkungan dari kelompok pemerhati lingkungan di tahun 1960 dan 1970-an. Gerakan pelestarian lingkungan hidup yang saat ini menjadi isu sentral bagi setiap negara di dunia, karena isu lingkungan telah memberikan keresahan dan keprihatinan bagi seluruh warga negara yang merasakan dampak dari permasalahan lingkungan seperti pemanasan global (*Global Warming*) maupun perubahan iklim. Akibat adanya isu-isu global tersebutlah telah mempengaruhi organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah di tingkat regional, nasional, lokal maupun tingkat komunitas. Sehingga gerakan yang awalnya dikembangkan pada negara-negara maju akhirnya mempengaruhi juga berbagai negara berkembang lainnya.

Ketika sistem ekonomi mendorong produsen untuk memaksakan diri memenuhi permintaan pasar, maka lingkunganlah yang pertama kali mendapatkan dampaknya. Ketidakseimbangan dan ketidak-arifan dalam menentukan pilihan antara ekonomi dan lingkungan pada akhirnya membawa dampak negatif di sisi lingkungan karena walau bagaimanapun dorongan ekonomi akan selalu berperan lebih signifikan.

Konsep *sustainable development* ini berkembang di banyak sektor terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan seperti sektor industri, sektor perumahan dan juga tentunya sektor pariwisata. Konsep ini mengedepankan pentingnya pelestarian lingkungan serta ekosistem untuk

**Universitas Indonesia**

kepentingan generasi mendatang dimana generasi sekarang memiliki kewajiban moral untuk mewariskan segala sesuatunya kepada generasi mendatang. *Sustainable development* dipandang sebagai sebuah proses rekonsiliasi antara tiga elemen kepentingan yaitu pertama kepentingan ekologis, dimana pelestarian keanekaragaman hayati menjadi poin pokok; kedua adalah kepentingan sosial dimana sistem sosial dan politis yang ada harus mampu mempropagandakan dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat; dan yang terakhir adalah kepentingan ekonomi yang menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia (Dale, 2005, h.9)

Namun pelaksanaan konsep-konsep tersebut di lapangan tidaklah mudah. Apalagi di negara-negara berkembang karena masalah lingkungan hidup yang dihadapi banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam (Salim, 1985, h.17). Menurut Salim (1985, h.15), rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbuka kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber alam bagi keperluan hidupnya. Oleh karena itu negara berkembang perlu mengusahakan pembangunan menanggulangi kemiskinan yang ada, tetapi menurut cara dan jalan pembangunan pengembangan lingkungan hidup.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan maka usaha-usaha untuk mengurangi pengaruh buruk pembangunan terhadap lingkungan tersebut perlu dilaksanakan. Khusus untuk sektor pariwisata, perkembangannya belakangan ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan eksploitasi yang berlebihan pada suatu tujuan wisata yang pada akhirnya berakibat penurunan potensi serta minta wisatawan untuk datang dan mengunjungi objek wisata tersebut. Minimnya perhatian serta pengawasan akan berakibat fatal manakala eksploitasi yang dilakukan sudah melewati ambang batas kewajaran. Untuk itulah muncul konsep *sustainable tourism* yang mengedepankan arti pentingnya kelestarian objek wisata alam dari tangan-tangan jahil berbentuk eksploitasi yang berlebihan. Konsep pariwisata yang berkelanjutan ini juga dikenal dengan sebutan ekowisata.

## 2.2 Ekowisata

### 2.2.1 Definisi dan Batasan Ekowisata

Pengertian ekowisata sampai saat ini masih diperdebatkan, dan paling tidak terdapat lebih dari 5 definisi seperti yang dikemukakan oleh Fannel, *The International Ecotourism Society* dan *World Conservation Union*.

Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Hector Ceballos dan Lascurain dan kemudian disempurnakan oleh *The Ecotourism Society* (dalam Eplerwood, 2002) dengan mendefinisikan “*Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserve the environment and sustain the wellbeing of local people*” (Ekowisata adalah suatu perjalanan bertanggungjawab ke lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

*World Conservation Union* (dalam Eplerwood, 2002, h.9) “*Ecotourism is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturb natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural feature—both past and present) that promotes conservation, has low negative visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local population*”. (Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi wilayah yang masih asli untuk menikmati dan menghargai keindahan alam termasuk kebudayaan lokal, dan mempromosikan konservasi serta memberi keuntungan sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal )

Selain itu menurut United Nations Environmental Program (UNEP) (*About Ecotourism*, 2001) ekowisata harus mengandung beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan kontribusi terhadap konservasi dan keanekaragaman hayati.
- b. Mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat lokal.
- c. Mengikutsertakan pengalaman dan pembelajaran kepada wisatawan.
- d. Menekankan partisipasi masyarakat lokal dalam kepemilikan dan aktivitas pariwisata yang dikembangkan.

Ekowisata menurut Sudarto (PKK-LIPI dan LPPM-UIB, 2005, h. 9) adalah aktivitas-aktivitas dari perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami

atau daerah yang berhubungan dengan alam, dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam, menambah pengetahuan, pemahaman maupun mendukung kelestarian alam yang akan meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

*Australian National Ecotourism Strategy* (dalam Yoeti, 2000, h. 37) mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan.

Batasan ekowisata hendaknya memiliki ciri khusus dan berbeda dengan batasan tentang pariwisata yang kita kenal. Ciri-ciri tersebut (Yoeti, 2000, h. 38) antara lain:

1. Baik obyek maupun atraksi yang dilihat adalah yang berkaitan dengan alam atau lingkungan, termasuk didalamnya alam, flora dan fauna, sosial dan ekonomi, dari budaya masyarakat di sekitar proyek yang memiliki unsur-unsur keaslian, langka, keunikan, dan mengagumkan.
2. Keikutsertaan seorang wisatawan berkaitan keingintahuan, pendidikan, kesenangan, dan penelitian tentang sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.
3. Adanya keterlibatan penduduk setempat, seperti penyediaan penginapan, barang/kebutuhan, memberikan pelayanan, tanggung jawab memelihara lingkungan, atau bertindak sebagai instruktur atau pemandu.
4. Proyek pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar.
5. Proyek pengembangan ekowisata harus sekaligus dapat melestarikan lingkungan, mencegah pencemaran seni dan budaya, menghindari timbulnya gejolak sosial, dan memelihara kenyamanan dan keamanan.

Berdasarkan terlihat bahwa ekowisata berupaya mengedepankan pentingnya i memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta budaya setempat disamping terus menjaring pendapatan, membuka lapangan kerja serta melestarikan ekosistem lokal yang ada sehingga layak disebut sebagai bisnis pariwisata yang bertanggungjawab. Sebagai industri yang sangat bergantung pada sumber-sumber alam, elemen-elemen pada industri pariwisata harus menyadari tanggungjawabnya kepada lingkungan

sekitar. Pengembangan pariwisata yang tidak mengindahkan kelangsungan dan kelestarian lingkungan, dalam jangka panjang akan hilang daya tariknya dan tidak lagi menguntungkan secara ekonomis. Untuk mewujudkannya, diperlukan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata.

### **2.2.2 Prinsip Ekowisata**

Low Choy dan Heillbron (1997, h.61) merumuskan adanya lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu:

1. Lingkungan; ekowisata bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu.
2. Masyarakat; ekowisata harus memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
3. Pendidikan dan pengalaman; ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki.
4. Manajemen, ekowisata harus dikelola secara baik dan menjamin keberlanjutan lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang.
5. Berkelanjutan; ekowisata dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Fannel (1999,h.31) mengemukakan bahwa terdapat enam prinsip dasar ekowisata yang disepakati bisa membedakan kegiatan ekowisata dan wisata alam, yaitu:

- Memberikan dampak negatif yang paling minimum bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik pada pengunjung maupun penduduk lokal.
- Berfungsi sebagai bahan untuk pendidikan dan penelitian baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung (wisatawan, peneliti, akademisi).
- Semua elemen yang berkaitan dengan ekowisata harus memberi dampak positif berupa kontribusi langsung untuk kegiatan konservasi yang

melibatkan semua aktor yang terlibat dalam kegiatan ekowisata. Sebagai contoh pengunjung tidak hanya berfungsi sebagai penikmat keindahan alam tapi juga secara langsung sebagai partisipan dalam kegiatan konservasi.

- Memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan kawasan ekowisata.
- Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal berupa kegiatan ekonomi yang bersifat komplementer terhadap kegiatan ekonomi tradisional (bertani, mencari ikan dan lainnya).

Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata tersebut menunjukkan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diterapkan dalam mengembangkan wisata.

### **2.2.3 Kriteria Pengembangan Ekowisata**

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ekowisata (Yoeti, 2000, h. 42) antara lain:

1. Kelayakan pasar dan kapasitas kunjungan
2. Tersedianya aksesibilitas yang memadai ke daerah tersebut
3. Potensi yang dimiliki daerah untuk dijadikan kawasan ekowisata
4. Dapat mendukung pengembangan wilayah lain di daerah tersebut
5. Memberi peluang bagi pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan bagi masyarakat setempat.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikaji, misalnya dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah, tentunya berbeda diantara satu daerah dengan daerah lainnya mengingat karakteristik dan budaya masyarakat di tiap-tiap daerah juga berbeda-beda. Pada masyarakat di wilayah dataran tinggi yang disekitarnya terdapat pegunungan dan sungai, mungkin saja jenis wisata yang ditawarkan berupa *rafting*, *hiking* dan sebagainya. Sedangkan pada masyarakat pesisir, jenis wisata lebih bersifat wisata bahari.

### **2.2.4 Wisata Bahari**

Wisata pesisir dan bahari adalah bagian dari wisata lingkungan (*ecotourism*), Sarwono Kusumaatmaja, mantan Menteri Negara Lingkungan hidup



dan mantan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, dalam Aryanto (2003) berpendapat; selain sebagai bagian dari ekowisata, wisata pesisir dan bahari merupakan industri yang menjanjikan. Lebih lanjut Aryanto (2003) memaparkan bahwa wisata bahari ini merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan dan terjadi di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan dan kelautan. Daya tarik itu mencakup perjalanan dengan moda/alat transportasi laut; kekayaan alam bahari serta peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan di laut dan di pantai, seperti misalnya lomba memancing, selancar, menyelam, lomba layar, olah raga pantai, dayung, upacara adat yang dilakukan di laut. Selain itu, adat istiadat dan budaya masyarakat pesisir dan bahari.

Dengan demikian, cakupan kegiatan wisata ini memiliki spektrum industri yang sesungguhnya sangat luas dan bisnis yang ditawarkannya sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel, restoran terapung, kawasan lepas pantai, rekreasi pantai, konvensi di pantai dan di laut, pemandu wisata alam, dan sebagainya (Aryanto, 2003). Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain jasa foto dan video, pakaian dan peralatan olah raga, jasa kesehatan, jasa keamanan laut, jasa rescue, kerajinan dan cinderamata, pemasok makanan dan minuman, hiburan dan lain sebagainya. Konsep wisata pesisir dan bahari di dasarkan pada pemandangan alam dan keunikannya, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Wheat dan Steele (dalam Aryanto, 2003) berpendapat wisata pesisir dan bahari adalah proses ekonomi yang memasarkan ekosistem dan merupakan pasar khusus yang menarik dan langka untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Wisata Bahari bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan. Di dalam wisata bahari juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir. Sehingga kegiatan wisata bahari akan membentuk

kesadaran tentang bagaimana menentukan sikap dalam melestarikan wilayah pesisir baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Menurut Siti Nurisyah (PKK-LIPI dan LPPM-UIB, h.6-7), kegiatan wisata ada yang memanfaatkan wilayah pesisir secara langsung dan tidak langsung Jenis-jenis wisata yang secara langsung memanfaatkan wilayah pesisir antara lain:

- a. Berperahu
- b. Berenang
- c. *Snorkling*
- d. Menyelam
- e. Pancing

Sedangkan jenis-jenis wisata yang secara tidak langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan antara lain:

1. Kegiatan olahraga pantai
2. Piknik menikmati atmosfer laut

Orientasi pemanfaatan pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam mengembangkan kawasan. Aspek kultural dan fisik merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dan saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Gunn (dalam PKK-LIPI dan LPPM-UIB, h. 8) mengungkapkan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan pada empat aspek, yaitu:

1. Mempertahankan kelestarian lingkungan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
3. Menjamin kepuasan pengunjung
4. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya

Aspek-aspek yang dijabarkan oleh Gunn tersebut, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun keterpaduan pembangunan masyarakat, dalam Ilmu Kesejahteraan sosial, dikenal suatu metode intervensi komunitas yaitu pengembangan masyarakat yang merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat.

## 2.3 Pemberdayaan Masyarakat

### 2.3.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Banyak ahli yang telah membahas berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat. Adi (2002) mengemukakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti luas, pada dasarnya juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup (1) peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial, (2) peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan, (3) penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Berbagai upaya yang dilakukan terhadap kelompok sasaran, seringkali diidentikan sebagai upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. (Adi, 2002, h.161-162).

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' (kekuasaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005). Suharto mendefinisikan pemberdayaan sebagai kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan dan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Untuk memperoleh gambaran tentang konsep pemberdayaan, pengertian dari beberapa tokoh disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Beberapa Pengertian Pemberdayaan

Tokoh	Pengertian Pemberdayaan
Ife (1995, h.182)	<p><i>"...empowerment means providing people with the resources, opportunity, knowledge, and skill to increase their capacities to determine their own future, and to participate in and affect of their community..."</i></p> <p>"...pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri..."</p>
Rappaport (Dubois, 1992, h.209)	<p><i>"Empowerment is a way that people organizations and communities gain mastery over their lives"</i></p> <p>(Suatu cara atau jalan bagi mereka yang tidak berdaya untuk memperoleh keahlian dalam kehidupan mereka)</p>
Swift & Levin (Dubois,1992, h.209)	<p><i>"Empowerment refers to a state of mind, such as feeling worthy and competent or perceiving power and control, and it also refers to the reallocation of power through a modification of the social structure"</i></p> <p>(Suatu kondisi masyarakat yang merasa kuat, berkuasa, dan menguasai, dan ini juga merupakan kondisi dimana terjadi realokasi kekuatan/kekuasaan melalui modifikasi struktur sosial)</p>
Payne (1997) dalam Adi (2003, h.54)	<p><i>"to help the clien gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to client"</i></p> <p>(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui transfer daya dari lingkungan)</p>
Friedman (Kartasasmita, 1996, h.143)	<p><i>"the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision marking of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory)</i></p>

	<p><i>democracy, and experiential social learning</i>".</p> <p>(pendekatan pemberdayaan, adalah hal mendasar dalam pembangunan alternatif, menekankan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari masyarakat yang secara territorial terorganisasi, memperkuat kemandirian lokal (tetapi tidak autarki), demokrasi langsung (partisipatoris), dan pengalaman bersosial)</p>
Schumacker (Adimiharja & Hikmat)	pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses memberikan kekuatan bagi masyarakat melalui pemberian ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka mampu untuk mandiri.

Dari berbagai definisi diatas, terlihat bahwa makna pemberdayaan menghasilkan banyak interpretasi yang berbeda. Pemberdayaan ini bisa bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan tersebut sehingga bentuk pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan pemberdayaan bidang budaya, pemberdayaan lingkungan atau pemberdayaan pendidikan. Intinya, berbagai macam pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat (Adi, 2008, h. 79). Berbagai macam pandangan mengenai pemberdayaan di atas berguna untuk memperluas pengetahuan dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini akan lebih memfokuskan konsep pemberdayaan menurut Ife (1995, h. 182) dalam menganalisa pada bab selanjutnya, yaitu pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri.

Hal yang sering menjadi masalah adalah bagaimana menyinergikan berbagai macam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai bidang dengan melibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah, ataupun menyinergikan pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan bidang yang berbeda. Menurut Adi ada tiga pilar utama dari pelayanan masyarakat yang memainkan peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu pemerintah, LSM dan sektor swasta (Adi, 2008, h.22) Ketiganya memainkan peranan penting dengan suatu perubahan masyarakat menuju kondisi yang mereka inginkan. Dalam upaya

memenuhi kebutuhan masyarakat maka akan terlihat peran partisipasi masyarakat yang menjadi hal penting dalam suatu proses pengkajian dan pengidentifikasian (*assessment*), perencanaan dan keputusan rencana aksi (*action plan*) yang akan dilakukan oleh lembaga pelayanan masyarakat. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pihak pemberi layanan akan kesulitan untuk menangkap apa aspirasi masyarakat yang mewakili pandangan sebagian besar kelompok-kelompok dalam suatu komunitas.

### 2.3.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005, h.66), dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau arah pemberdayaan (*empowerment setting*) : mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial. Kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Suharto, 2006, h.66)

Selanjutnya, menurut Batten dalam Adi (2003, h.228-231), pada dasarnya ada dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Pendekatan Direktif

Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa *community worker* tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik bagi masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan *community worker* bersifat dominan, sehingga pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang instruktif. Pendekatan ini cocok diterapkan pada masyarakat yang relatif belum berkembang.

2. Pendekatan Non-Direktif

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan partisipatif, dimana asumsinya adalah bahwa masyarakat tahu betul apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Peran *community worker* lebih berfokus pada peran sebagai *enabler*, *encourager*, dan *educator*. Tujuan dari pendekatan Non-Direktif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka sendiri. Pendekatan ini cocok diterapkan pada masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang mereka miliki.

### 2.3.3 Prinsip Pemberdayaan

Menurut Sullivan dan Kisthardt, Solomon, Rapaport, Swift dan Levin (Suharto, 2005, h.69-70), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial.

- Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

- Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

#### **2.3.4 Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu Program dan Proses**

Menurut Adi, (2008, h.84), upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program atau proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Konsekuensinya, bila program itu selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan. Bahkan tidak saling mengetahui apa yang dikerjakan oleh bagian yang lain, meskipun dalam lembaga yang sama, sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya juga tidak jarang terputus karena telah berakhirnya dukungan dana dari pihak donor.



Sementara itu ada kelompok lain yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada program saja.

Dengan semakin berkembangnya suatu masyarakat maka tuntutan warganya untuk mendapatkan berbagai layanan dari negara (pemerintah) akan semakin meningkat, padahal disini lain sumberdaya (*resources*) yang dimiliki oleh suatu negara tidaklah meningkat secepat tuntutan masyarakat. Kerena itulah layanan berbasis masyarakat (*community based services*) menjadi penting. Namun layanan berbasis masyarakat ini selayaknya dikembangkan bukan untuk mendongkrak nama baik perusahaan, organisasi pemerintah maupun LSM, tetapi ia dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Guna memberi layanan yang tepat dan menjawab kebutuhan masyarakat, unsur aspirasi masyarakat perlu dipertimbangkan oleh lembaga pelayanan masyarakat, termasuk didalamnya organisasi pemerintah, LSM maupun sektor swasta.

Pada penelitian ini, meskipun pemberdayaan dapat dilihat sebagai program dan proses, namun pembahasan akan lebih banyak dikaitkan dengan program yang dijalankan oleh Terangi dan Kelompok Elang Ekowisata. Upaya pemberdayaan dikonstruksikan dalam bentuk tahapan-tahapan pemberdayaan dimana dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program.

### **2.3.5 Peran dan Keterampilan Agen Perubahan**

Spergel (1975, h.15-319), Zastrow (1986, h.49-50) dan Adi (1994,h.26-29) melihat sekurang-kangnya ada tujuh peran yang dapat dikembangkan oleh *community worker*, yaitu:

#### **1. Pemercepat Perubahan (*Enabler*)**

Peran *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka; dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Ada empat fungsi utama dalam peran

**Universitas Indonesia**

ini, yaitu: (a) membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka, (b) membangkitkan dan mengembangkan 'organisasi' dalam masyarakat, © mengembangkan relasi interpersonal yang baik, dan (d) memfasilitasi perencanaan yang efektif.

2. Perantara (*Broker*)

Peran broker adalah menghubungkan individu ataupun kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.

3. Pendidik (*Educator*)

Peran sebagai pendidik memrasyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan sehingga ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan.

4. Tenaga Ahli (*Expert*)

Peran sebagai tenaga ahli memprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Namun saran dan usulan tersebut lebih merupakan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam pengambilan keputusan.

5. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis, dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.

6. Advokat (*Advocate*)

Peran advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak

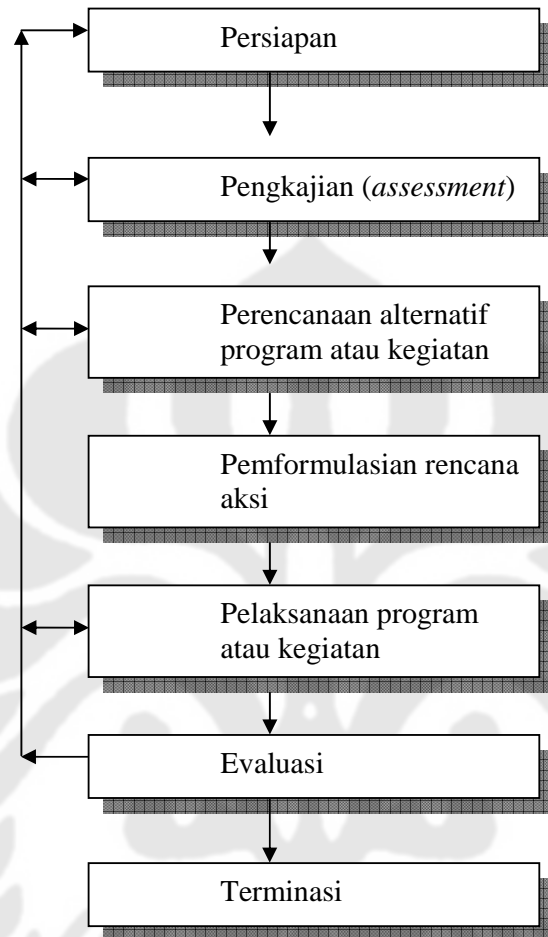
memedulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga). Community worker biasanya dituntut untuk melakukan persuasi terhadap kelompok profesional atau kelompok elit tertentu.

#### 7. Aktifis (*Activist*)

Peran aktifis menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantage group*) yang dianggap sebagai korban.

### **2.3.6 Tahapan pemberdayaan masyarakat**

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002, h. 179). Adi (2003) menjabarkan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Prof. Cox mengenai tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaan, meskipun disebut sebagai tahapan, namun bukanlah merupakan tahapan yang menyerupai anak tangga, dimana seseorang harus berjalan melalui tahap demi tahap secara berurutan, melainkan merupakan tahapan yang berbentuk siklus (*cyclical*) dan spiral dimana agen perubahan dimungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila mendapatkan masukan baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program pemberdayaan tersebut. Tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut (Adi, 2003, h.260):



Gambar 2.1 Skema Tahapan Pengembangan Masyarakat

Sumber: Adi, 2003

Bila dilihat dari tabel diatas, maka terlihat adanya panah dua arah pada tahap 2, 3 dan 4 menunjukkan adanya kemungkinan untuk meninjau ulang tahap-tahap tersebut dan kembali ke tahap sebelumnya. Sehingga program pemberdayaan masyarakat bukan sekedar menjadi program pemberdayaan yang bersifat kaku, tetapi lebih merupakan suatu program yang bersifat fleksibel dan

berusaha untuk tanggap atas perubahan dan kebutuhan yang berkembang pada komunitas sasaran.

Untuk lebih memperjelas skema dari masing-masing tahap diatas, maka akan diuraikan secara singkat tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti yang tergambar di atas sebagai berikut (Adi, 2003, h.251):

- Tahap *Engagement* atau Persiapan

Pada tahap persiapan ini setidaknya ada dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu (i) Penyiapan petugas: Penyiapan tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan (ii) Penyiapan lapangan: merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

Penyiapan petugas: diperlukan terutama untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah (*change agent*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Penyiapan petugas lebih diperlukan bila dalam suatu program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, memiliki tenaga petugas yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya.

Penyiapan Lapangan. Dikenal dengan tahap *engagement*. Petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran baik dilakukan secara informal maupun formal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, *community worker* mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait. Disamping itu *community worker* juga tetap harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal (*informal leader*) agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Pada tahap inilah terjadi kontak dengan komunitas sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindaklanjuti agar terdapat kedekatan antara agen perubah dengan komunitas sasaran. Komunikasi yang baik pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi keterlibatan warga pada fase berikutnya.

Guna menjaga dan mengembangkan kontak dengan warga, tidak jarang *community worker* harus menawarkan bentuk kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

- Tahap Pengkajian atau *Assesment*.

Proses *assesment* dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*). Tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam tahap ini, petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = *felt needs*) dan juga sumber daya yang memiliki sasaran. dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan *assessment*, baik itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam melakukan *assesment*, sebaiknya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini, pelaku perubahan juga diharapkan dapat memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

Dalam proses *assessment*, dikenal pula konsep 'kebutuhan normative' (*normative needs*), yaitu kebutuhan berdasarkan standar norma yang berlaku. Kadangkala suatu masyarakat tidak merasakan suatu hal sebagai kebutuhan mereka, tetapi *community worker* melihat bahwa kondisi yang sudah ada perlu diperbaiki. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menjalankan peran edukasional (dengan melakukan penyadaran masyarakat ataupun memberikan informasi pada masyarakat) agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan mereka secara lebih rasional.

- Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah (*change agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

Program dan kegiatan yang akan mereka kembangkan harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan, sehingga tidak muncul program-program yang bersifat *charity* (amal) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Dalam proses ini, petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu.

- Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam tahap ini, diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian mereka dapat mengarahkan tindakan itu sesuai dengan apa yang diformulasikan.

- Tahap Implementasi atau Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, mengingat sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat, maupun antar sesama warga itu sendiri sebagai sasaran dari

program, karena pertentangan antar kelompok masyarakat juga dapat menghambat pelaksanaan program atau kegiatan.

Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Dalam pelaksanaan program, seringkali teknologi yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, agar masyarakat mampu menjalankan program tersebut. Tetapi lebih jauh dari itu, kesediaan warga menjadi kader merupakan suatu aset yang sangat bermanfaat guna kemajuan komunitas tersebut.

- Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari sasaran dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan sasaran itu sendiri. Dengan keterlibatan sasaran akan terbentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih 'mandiri' dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tetapi kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka evaluasi diharapkan akan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan. Karena agen perubah (*change agent*) juga menyadari bahwa tolak ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi ini sendiri dapat dilakukan pada input, proses (yang juga dikenal sebagai pemantauan atau *monitoring*) dan juga pada hasil (*output*).

Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah diharapkan untuk terjadi. Untuk menstabilkan perubahan yang telah terjadi, dapat dilakukan dengan memberikan *reward* (yang dapat pula berupa pujian, tidak selalu berbentuk uang maupun materi) kepada sasaran yang sudah dapat berubah, ataupun memberikan kontrol yang bersifat 'menghukum' (*punishment*) kepada sasaran yang dirasa tidak kunjung berubah.

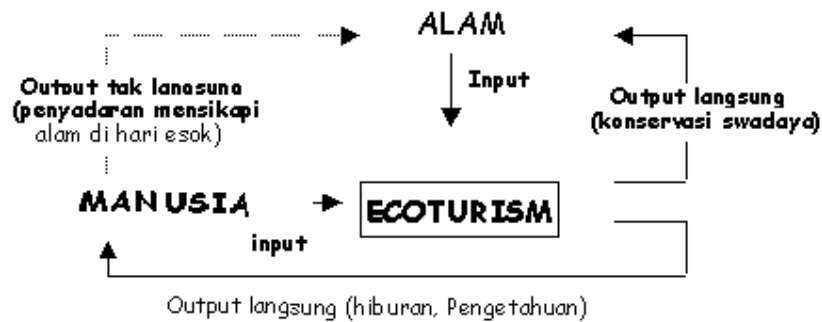


- Tahap Terminasi atau *Disengagement*

Merupakan tahap 'pemutusan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau juga karena anggaran sudah habis dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar dari komunitas sasaran secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak oleh petugas. Bila petugas merasa tugasnya belum diselesaikan dengan baik, petugas akan tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

#### **2.4 Ekowisata, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Yusran (2001) menjabarkan hubungan antara ekowisata dengan pemberdayaan masyarakat. Penekanan ekowisata pada sumberdaya lokal menjadikan ekowisata menarik bagi negara-negara berkembang. Ekowisata dipandang sebagai suatu cara untuk membayar konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan-lahan yang dibiarkan dalam kondisi alami. Para pekerja konservasi ekonomi telah menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelamatkan alam dengan mengorbankan penduduk lokal.



Gambar 2.2 Skema ekowisata dengan output yang bukan saja ditujukan untuk menghibur manusia, tetapi juga memperhatikan kepentingan alam.

Sumber: Yusran, 2001

Bila ekowisata diibaratkan sebuah proses, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2. Yang menjadi inputnya adalah manusia (wisatawan) dan alam (termasuk kehidupan penduduk setempat). Output dari proses ini adalah output langsung baik bagi manusia maupun bagi alam dan output tak langsung. Output langsung yang dirasakan manusia adalah unsur hiburan dan penambahan pengetahuan, sedangkan output langsung bagi alam adalah perolehan dana yang dapat difungsikan untuk kegiatan konservasi alam secara swadaya. Sedangkan output tak langsung yakni berupa tumbuhnya kesadaran dalam diri wisatawan untuk lebih memperhatikan sikap hidupnya dihari-hari esok agar tidak berdampak buruk pada alam.

Pengembangan ekowisata akan memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh aktivitas ekowisata. Pola ekowisata akan secara simultan melestarikan sumberdaya alam, sosial budaya masyarakat lokal dan secara ekonomi sangat menguntungkan. Dari sisi ekonomi, kekayaan sumberdaya hayati serta keberadaan kawasan konservasi akan menciptakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Perolehan nilai ekonomi yang besar dapat digunakan untuk upaya konservasi sumberdaya alam. Dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekowisata akan menjamin keamanan dan keberadaan sumberdaya alam tersebut.

## 2.5 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana yang dikemukakan Adi (2007), pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan manfaat pemberdayaan.

Ife (2008, h. 140-144) melihat bahwa pemberdayaan bertujuan untuk memberikan keberdayaan/kekuasaan (*power*) pada mereka yang kurang diuntungkan (*disadvantage*). Dalam konsep keberdayaan (*power*), Ia menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 8 keberdayaan yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mengembangkan layanan yang berbasis pada komunitas, yaitu:

1. Keberdayaan untuk menentukan gaya hidup dan pilihan-pilihan pribadi mereka (*power of personal choices and life chances*).
2. Keberdayaan untuk mempertahankan HAM.
3. Keberdayaan untuk menentukan kebutuhan mereka (*power over the definition of need*).
4. Keberdayaan untuk mengkaji dan mengemukakan gagasan mereka (*power over ideas*).
5. Keberdayaam untuk mengkaji, mempertahankan ataupun merubah suatu institusi yang ada (*power of institution*).
6. Keberdayaan untuk mengakses atau menjangkau sumber daya (*power over resources*).
7. Keberdayaan untuk dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat (*power over economic activity*).
8. Keberdayaan untuk mengendalikan proses reproduksi (*power over reproduction*).

Ife (2008, h.410) juga mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat yang terpadu mencakup enam dimensi yang antara lain dimensi pengembangan sosial, pengembangan politik, pengembangan budaya, pengembangan lingkungan dan serta pengembangan personal/spiritual. Keenam dimensi ini sesungguhnya mengacu pada pemberdayaan di bidangnya masing-masing. Namun penjelasan

masing-masing dimensi tersebut dibatasi penggunaannya pada manfaat program ekowisata berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

### **2.5.1 Pengembangan Sosial**

Pengembangan sosial yang dimaksud meliputi pengembangan pelayanan, balai masyarakat, perencanaan sosial dan semangat sosial. Namun penjelasan akan lebih difokuskan pada pengembangan pelayanan dan semangat sosial karena kedua hal tersebut lebih relevan dalam penelitian ini.

Mengenai pengembangan pelayanan, ini merupakan persoalan proses, Karen tidak sedikit aktivitas pengembangan komunitas tradisional pada dasarnya merupakan pengembangan pelayanan sosial yang mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas ini secara tipikal mencakup proses identifikasi persoalan yang menjadi perhatian umum terhadap penyedia-penyedia layanan dalam masyarakat, studi tentang problem, pertemuan publik dan forum serta konsultasi, membentuk badan baru, melaksanakan pengembangan badan baru tersebut, hingga mengevaluasi badan baru yang ada dan pelayanannya meliputi penjaminan bahwa badan baru tersebut akuntabel pada masyarakat lokal atau konstituennya (Ife, 2008, h.412-414).

Tujuan pengembangan sosial kadang tidak untuk mendirikan pelayanan masyarakat yang baru, tetapi untuk membantu pelayanan yang ada untuk berfungsi lebih efektif melalui koordinasi dan perencanaan yang lebih baik. (Ife, 2008, h.420)

Pengembangan sosial dilihat dari semangat sosial artinya berfokus pada kualitas sosial yang sesungguhnya dalam suatu masyarakat, bukan secara langsung berfokus pada tersedianya pelayanan kemanusiaan. Oleh karena itu suatu program pengembangan masyarakat hanya memberikan fasilitas kepada orang-orang dalam masyarakat untuk saling berbicara dan berinteraksi lebih besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peran pekerja masyarakat merupakan salah satu katalisator yang bertujuan untuk mengantarkan orang-orang untuk menemukan potensi mereka untuk pengalaman masyarakat dan untuk aksi mereka (Ife, 2008, h.421).

### **2.5.2 Pengembangan Ekonomi**

Terdapat potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang ada di masyarakat lokal (Ife, 2008, h.425). Banyak program pengembangan ekonomi masyarakat lokal menggunakan bentuk ini dan program-program tersebut dapat berhasil dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjadi kebanggaan dalam prestasi lokal. Hal ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumberdaya lokal, bakat, minat, dan keahlian beserta penaksiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu. Terkait dalam penelitian ini adalah industri wisata. Pariwisata dapat mendukung terbukanya lapangan kerja, mendatangkan keuntungan dari bisnis yang berbeda-beda dan 'menempatkan masyarakat itu pada peta' (Ife, 2008, h.427).

Namun disisi lain pariwisata dapat menimbulkan efek yang membahayakan terhadap struktur masyarakat itu sendiri karena sudah pasti industri pariwisata mempunyai hubungan yang eksploitatif dengan para wisatawan yang bertujuan untuk membelanjakan uang mereka. Bersikap ramah-amah, sopan dan berkemauan untuk menolong kepada wisatawan dilakukan demi menarik keuntungan secara ekonomi, bukan karena nilai untuk berbuat demikian.

### **2.5.3 Pengembangan Politik**

Pengembangan politik sesungguhnya sangat terkait dengan gagasan pemberdayaan karena pada dasarnya pengembangan politik menyangkut isu kekuasaan (keberdayaan). Analisis kekuasaan menjadi penting baik pada level makro yang berkaitan dengan struktur-struktur dan wacana ketimpangan/penindasan maupun pada level lokal. Mengubah distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga kekuasaan ini dapat dibagi lebih adil merupakan tujuan pengembangan politik. Pengembangan politik berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dan meningkatkan kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan

dan kelompok dalam masyarakat itu untuk memberikan kontribusi dalam proses masyarakat, aktivitas dan keputusan.

Dalam kedua arena pengembangan politik yang dapat ditetapkan sebagai internal dan eksternal. Dari kedua arena ini, terdapat tiga proses penting pengembangan politik: peningkatan kesadaran, pengorganisasian dan aksi (Ife, 2008, h.437). Kemampuan untuk menghubungkan pengembangan personal dan politik, dan membantu orang-orang untuk berbagi pengalaman dan memikirkan situasi mereka dengan cara yang dapat membuka peluang untuk bertindak merupakan aspek peningkatan kesadaran (Ife, 2008, h.438). Aspek lainnya adalah pengorganisasian, yaitu cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengatur dirinya untuk mengatasi problem yang dihadapi dan untuk membangun alternatif dan struktur yang otonom dalam jangka panjang.

#### **2.5.4 Pengembangan Budaya**

Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal dan strategi masyarakat yang cermat diperlukan jika tradisi tersebut ingin dilestarikan. Inisiatif harus muncul dari masyarakat itu sendiri, dan cara yang digunakan sangat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya menurut kondisi lokal, budaya dan ekonominya. Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen yang unik dan signifikan dari warisan budayanya untuk menentukan komponen mana yang ingin dipertahankan (Ife, 2008, h.449-450). Tantangan untuk pengembangan masyarakat diharapkan dapat membantu mempertahankan integritas keanekaragaman budaya sambil mengupayakan cara-cara mengintegrasikan tradisi-tradisi budaya yang berbeda dalam masyarakat lokal dan memperkaya pengalaman budaya yang ada. Budaya tidaklah statis, norma-norma budaya, nilai dan praktik berubah setiap saat. Budaya tidak monolitik, banyak nilai dan praktik dibenturkan dalam budaya dan tidak perlu diikuti atau didukung oleh semua anggota kelompok (Ife, 2008, h.463).

Budaya partisipatif juga merupakan aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dilihat sebagai cara penting untuk membangun modal

**Universitas Indonesia**

sosial dan bagunan masyarakat, memperkuat masyarakat dan menegaskan identitas (Ife, 2008, h.467). Partisipasi juga merupakan cara bagi masyarakat untuk memperoleh kembali budaya mereka sendiri. Aktivitas-aktivitas masyarakat memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran, eksplorasi penindasan, menghubungkan problem-problem personal dan politik serta problem sosial. Budaya memiliki kekuatan untuk member inspirasi, informasi dan menyatukan masyarakat.

### **2.5.5 Pengembangan Lingkungan**

Isu lingkungan kadangkala sangat penting dalam menyadarkan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi katalisator untuk aksi masyarakat. Kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya lingkungan yaitu bahwa masyarakat perlu bertanggungjawab atas perlindungan dan rehabilitasi lingkungan fisik. Lingkungan merupakan komponen penting dari masyarakat, dan perlu dicakup dalam pendekatan yang terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Pendekatan ini berlaku untuk lingkungan alam maupun lingkungan buatan (Ife, 2008, h.470).

Pendekatan berbasis masyarakat untuk perencanaan perkotaan dan regional mengharuskan adanya mekanisme yang memadai bagi orang-orang untuk terlibat dalam keputusan-keputusan tentang atribut fisik perkotaan, pinggiran kota dan daerah. Keputusan-keputusan yang sekarang ini dilihat sebagai wewenang para perencana ahli, atau sebagai wewenang propinsi pengembang, akan dilihat sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan partisipasi lokal.

Pengorganisasian untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas komunitas memiliki dampak minimal terhadap lingkungan yang lebih luas (seperti lapisan ozon, rumah kaca) maupun terhadap lingkungan lokal menjadi bagian dari strategi pengembangan lingkungan masyarakat.

### **2.5.6 Pengembangan Personal/Spiritual**

Dalam membahas pengembangan masyarakat, sangat penting untuk melibatkan perkembangan personal dalam analisis kekuasaan dan memahami

tujuan pemberdayaan dalam konteks kekuasaan seperti yang disinggung diatas (8 keberdayaan).

Demikian pula, dianjurkan bahwa dalam masyarakat yang berkembang dengan baik dan sehat, orang-orang dapat tumbuh dan berkembang secara personal melalui interaksi mereka dengan orang lain (Ife, 2008, h.479). Oleh sebab itulah perkembangan personal merupakan pengembangan struktur interaktif masyarakat yang kuat. Pengembangan personal dapat juga dicapai melalui keterlibatan dalam berbagai proses pembangunan masyarakat. Aktivitas-aktivitas seperti bekerja dalam program pengembangan lingkungan masyarakat menjadi peninggalan berharga yang dapat memberikan mereka rasa kebermaknaan dan tujuan serta peluang untuk pengembangan personal (Ife, 2008, h.479).

Pengembangan personal ini dapat juga membantu membangun masyarakat dengan membangun struktur yang kuat dan pertalian yang erat diantara masyarakat (Ife, 2008, h.480).

